
Analisis Efektivitas, Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Buton Utara

La Nita¹, Ibnu Hajar², Muh. Irfandy Azis³

^{1,2,3} STIE Enam-Enam Kendari, Indonesia

Email : lanita66@gmail.com, ibnuhajar1954@gmail.com, muh.irfandyazis@gmail.com

Article History:

Received February 1 st , 2018

Accepted February 18 th , 2018

Published February 20 th , 2018

Keyword:

Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi

Abstrak: *The aim of this research is for knowing, identificating and effectiveness analyzing, autonomy and economic growth of the government of North Buton Regency. This research is using financial data of income Budget expenditure Region (APBD) and Product Domestic Regional Bruto (PDRB) percapita of the North Buton Regency in year 2010-2015. The data that has used in this research is quantitative data with using Statistic descriptive method in the analyzing of processing data. Statistic descriptive analyzing is technique data analyzing for summarizing and description numeric data in order to easy to interpret. Based on the result of analysis that has done it, got the result as follows : 1) effectiveness ratio of financial of the government of North Buton Regency during the six years has rerate 96,76 % that include effective. The effectiveness trend of financial region, the highest gotten in year 2013 namely 133,66 % and the lowest is in year 2010 namely 11,53 %; 2) The autonomy ratio financial of the government of North Buton Regency during the six years rerate 1,96 % still among (0-25) % that include is very low. The trend of autonomy financial region, the highest is in year 2012 namely 2,81 % and lowest is in year 2010 namely 0,34 %; and 3) The result of counting of economy growth trend of the government of North Buton Regency in year 2010-2015 was showing the good growth with rates persentase 8,31 %. The highest trend of economy growth in year 2011 namely 9,54 % and the lowest is in year 2015 namely 4,04 %.*

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengelola keuangan daerah secara optimal dibutuhkan sumberdaya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Daerah adalah sebuah perencanaan keuangan yang merupakan pembelanjaan daerah dalam satu periode tahun anggaran. APBD ini dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran, dan ukuran standar evaluasi kinerja serta alat koordinasi semua aktivitas di berbagai unit kerja.

Prestasi keuangan pemerintah daerah diukur lewat penilaian kinerja yang dilakukan dengan menganalisis rasio keuangan antar komponen dalam batang tubuh APBD. Penilaian kinerja pemerintah daerah ini merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Beberapa kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat digunakan adalah rasio efektivitas keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio efektivitas dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pemerintah Kabupaten Buton Utara sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dari sisi pendapatan asli daerah menunjukkan hasil yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 target PAD sebesar Rp. 5.580.063.443 realisasi sebesar Rp. 643.169.540, tahun 2011 target PAD sebesar Rp. 6.130.063.443 realisasi sebesar Rp. 7.292.730.711, tahun 2012 target PAD sebesar Rp. 8.556.613.204 realisasi sebesar Rp. 10.600.881.732, tahun 2013 target PAD sebesar Rp. 7.351.417.880 realisasi sebesar Rp. 9.826.179.237, tahun 2014 target PAD sebesar Rp. 10.122.458.681 realisasi sebesar Rp. 9.307.044.123 dan tahun 2015 target PAD sebesar Rp. 12.881.076.481 realisasi sebesar Rp. 12.954.475.584.

Keberhasilan menggali dan meningkatkan PAD, juga berkaitan dengan kemampuan suatu daerah membiayai sendiri pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari PAD bukan melalui sumber lain. Kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 menunjukkan peningkatan, namun apabila dibandingkan dengan besarnya dana transfer pusat dan provinsi kenaikannya tidak signifikan.

Pada tahun 2010 dana transfer sebesar Rp. 191.292.195.835 dan PAD sebesar Rp. 641.169.540, tahun 2011 dana transfer sebesar Rp. 347.362.075.182 dan PAD sebesar Rp. 7.292.730.711, tahun 2012 dana sebesar Rp. 377.136.417.820 dan PAD sebesar Rp. 10.600.881.732, tahun 2013 dana transfer sebesar Rp. 443.289.452.181 dan PAD sebesar Rp. 9.826.179.237, tahun 2014 dana transfer sebesar Rp. 486.982.375.593 dan PAD sebesar Rp. 9.307.044.123 dan tahun 2015 dana transfer sebesar Rp. 549.501.379.818 dan PAD sebesar Rp. 12.954.475.584.

Dengan memperhatikan pendapatan dalam APBD Kabupaten Buton Utara menunjukkan bahwa pendapatan transfer dan dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan PAD dengan rerata selama 6 (enam) tahun sebesar 98,04 %. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kemandirian pemerintah Kabupaten Buton Utara. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan cara membandingkan PAD dengan sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan demikian juga sebaliknya (Halim, 2002)

Semua pembelanjaan pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan hidup masyarakat. Gambaran kesejahteraan atau membaiknya taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari PDRB (Bastian, 2001). Data BPS Kabupaten Buton Utara menginformasikan pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 9,14 %, tahun 2011 sebesar 9,54 %, tahun 2012 sebesar 8,78 %, tahun 2013 sebesar 8,83 %, tahun 2014 sebesar 9,51 % dan tahun 2015 sebesar 4,04 %. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6(enam) tahun sebesar 8,31 % yang berarti baik namun perkembangannya cenderung melambat.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak lepas dari efektivitas keuangan, kemandirian keuangan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Efektivitas dan Kemandirian keuangan daerah akan turut mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini mengambil objek pada kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara karena

adanya publikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati Buton Utara periode 2010-2015 yang menyebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan adalah tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Utara melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara dan bahkan secara nasional. Namun disisi yang lain Kabupaten Buton Utara masih memiliki tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah. Hal ini tentu tidak terlepas dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang tidak maksimal dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian sejenis sebelumnya telah dilakukan oleh Dori Saputra (2014), tentang kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Daerah otonom Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dalam periode 2004-2011 masuk kategori kemandirian keuangan yang rendah sekali dan kategoriefektivitas keuangan sangat efektif secara rata-rata tahun 2004-2011. Sedangkan penelitian laju pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh Sardi dan Saranani (2016) di Kabupaten Konawe Utara dengan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara tahun 2009-2013 rata-rata pertumbuhannya cukup baik mencapai 8,05 persen pertahun.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka tulisan ini di arahkan untuk mengetahui efektivitas, kemandirian dan pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten Buton Utara. Dengan memperhatikan kinerja keuangan dan fenomena ekonomi yang muncul, maka yang menjadi masalah pokok adalah: 1) Bagaimanakah efektivitas keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015? 2) Bagaimanakah kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015? 3) Bagaimanakah pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015; 2) Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015; 3) Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang

direncanakan maka kinerjanya buruk. Menurut Mahsun (2006) “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi”.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2008). Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

B. Efektivitas Keuangan daerah

Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Menurut Siagian (2002) efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik. Rasio efektivitas keuangan daerah otonom menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio efektivitas keuangan daerah di rumuskan :

$$\text{Efektivitas Keuangan Daerah (EKD)} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

(Halim, 2002)

Kemampuan daerah menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Semakin besar realisasi PAD dibanding target PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya.

Nilai efektivitas keuangan daerah diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Kepmendagri No. 690.900-327, 1996) yang dikategorikan ke dalam lima tingkat efektivitas. Apabila persentase efektivitas kinerja keuangan di atas 100% dikatakan sangat efektif, 90%-100% adalah efektif, 80%-90% adalah

cukup efektif, 60%-80% adalah kurang efektif dan kurang dari 60% adalah tidak efektif.

C. Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Setiawan (2004) dalam Suharyat (2009), Kemandirian adalah keadaan seseorang yang dapat menentukan diri sendiri dimana dapat dinyatakan dalam tindakan atau perilaku seseorang yang dapat dinilai. Sedangkan Menurut Steinberg (2002) kemandirian merupakan kemampuan individu untuk bertingkah laku seorang diri. Berangkat dari defenisi tersebut maka dapat diambil pengertian kemandirian adalah keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri, tumbuh dan berkembang karena disiplin dan komitmen sehingga dapat menentukan diri sendiri yang dinyatakan dalam tindakan dan perilaku yang dapat dinilai.

Berkaitan dengan pengertian di atas dalam konteks otonomi daerah, peranan data keuangan sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan dan belanja yang harus dikeluarkan. Data keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran merupakan informasi penting untuk membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah terutama kemampuan kemandirian daerah (Yuliati, 2001).

Secara konseptual, rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat/provinsi ataupun dari pinjaman.

Berikut formula untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pusat/provinsi \& pinjaman}} \times 100\%$$

(Syukriy dan Halim, 2006)

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekterern. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekterern semakin rendah dan demikian juga sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah (Syukriy dan Halim, 2006).

Kriteria kemandirian keuangan daerah dapat diklasifikasikan ke dalam 4(empat) kategori. Apabila persentase kemandirian keuangan di atas 75% dapat dikatakan tinggi, 50%-75% adalah sedang, 25%-50% adalah rendah dan 0.0 %-25% adalah rendah sekali.

D. Pertumbuhan ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi didefenisikan sebagai penjelasan faktor-faktor yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1999). Secara umum pertumbuhan ekonomi diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi menekankan pada proses, output perkapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian yang bersifat dinamis, output perkapita mengaitkan aspek output total dan aspek jumlah penduduk, sedangkan jangka panjang menunjukkan perubahan perekonomian dalam jangka waktu tertentu oleh proses intern perekonomian (*self generating*). Pertumbuhan ekonomi juga sebagai kenaikan Gross Domestic Product (GDP) tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999).

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain: sumberdaya manusia, sumberdaya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumberdaya modal, manajemen dan kewirausahaan.

Pertumbuhan ekonomi regional dapat diukur dengan cara membandingkan PDRB tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya.

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi (GRW)} = \frac{\text{PDRB}_1 - \text{PDRB}_0}{\text{PDRB}_0} \times 100\%$$

(Sukirno, 2007)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dijadikan indikator laju pertumbuhan ekonomi agar dapat diketahui sektor mana yang menyebabkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\bar{g} = \frac{(g_1 + g_2 + g_3 \dots \dots \dots g_n)}{n}$$

Keterangan :

\bar{g} = laju pertumbuhan ekonomi rata-rata

1,2,3.... n = adalah tahun pengamatan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Objek penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Buton Utara dengan Populasi adalah laporan keuangan pemerintah dan Statistik Kabupaten Buton Utara. Sedangkan sampelnya adalah laporan realisasi anggaran dan PDRB Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dirancang untuk mengetahui efektivitas, kemandirian dan pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten Buton Utara.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penelitian. Data laporan keuangan pemerintah daerah dan PDRB Kabupaten Buton Utara diperoleh dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buton Utara atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010-2015 dan situs-situs lain, serta kunjungan langsung pada BPKAD dan BPS Kabupaten Buton Utara.

C. Metode Analisis Data.

Dalam penelitian ini tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif merupakan tehnik menganalisis data untuk meringkas dan mendeskriptifkan data numerik agar mudah untuk diinterpretasikan.

Langkah-langkah yang dibuat dalam tehnik analisis data ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang berasal dari objek penelitian yaitu BPKAD dan BPS Kabupaten Buton Utara.
2. Menghitung data dengan menggunakan rasio efektivitas keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio laju pertumbuhan ekonomi.
3. Menginterpretasikan data hasil perhitungan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten Buton Utara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Rasio efektivitas Keuangan Daerah.

Untuk mengukur efektif tidaknya pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015 dilakukan dengan cara menganalisis rasio efektivitas keuangan daerah yang menggambarkan kemampuan merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Perhitungan rasio efektivitas keuangan Kab. Buton Utara tahun 2010-2015

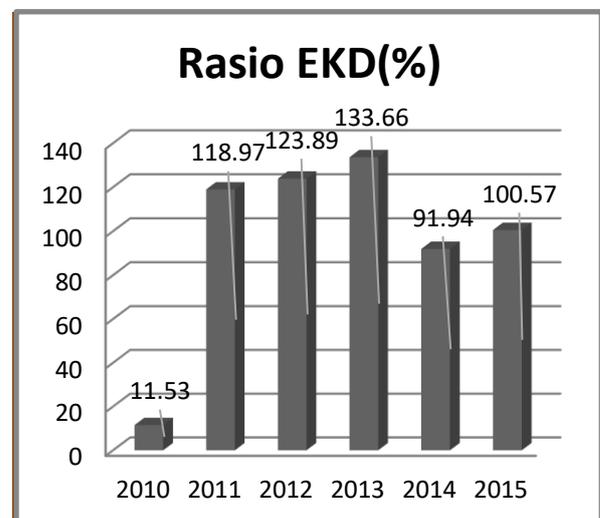
Tahun	Target PAD		Realisasi PAD		Rasio Efektivitas (%)
	Jumlah (Rp)	Perkemb. (%)	Jumlah (Rp)	Perkemb. (%)	
2010	5.580.063.443		643.169.340		11,53
2011	6.130.063.443	9,86	7.292.730.711	1.033,87	118,97
2012	8.556.613.204	39,58	10.600.881.732	45,36	123,89
2013	7.351.417.880	-14,08	9.826.179.237	-7,31	133,66
2014	10.122.458.681	37,69	9.307.044.123	-2,28	91,94
2015	12.881.076.481	27,25	12.954.475.584	39,19	100,57
Rata-rata		20,06		221,77	96,76

Sumber : BPKAD Kab. Buton Utara tahun 2016, data diolah

Berdasarkan perhitungan tabel di atas pada tahun 2013 kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah dianggarkannya sangat efektif dan tertinggi selama tahun 2010-2015 dengan persentase sebesar 133,66 %. Sedangkan tahun 2010 menunjukkan kriteria yang tidak efektif dan terendah selama tahun 2010-2015 dengan persentase sebesar 11,53 %.

Perkembangan efektivitas keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 1. Rasio efektivitas keuangan daerah Kab. Buton Utara tahun 2010-2015



Dilihat dari grafik di atas menggambarkan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah mengalami peningkatan dan penurunan. Secara rata-rata rasio efektivitas keuangan daerah selama tahun 2010-2015 efektif dengan persentase sebesar 96,76 %. Menurut Halim (2002) rasio efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara menunjukkan pada tahun 2010 sebesar 11,53 % adalah tidak efektif, kemudian meningkat tahun 2011 menjadi 118,97 % dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2012 dan 2013 efektivitas keuangan meningkat masing-masing sebesar 123,89 % dan 133,66 % kategori sangat efektif. Hal ini berarti kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan target mengalami peningkatan signifikan.

Selanjutnya rasio efektivitas keuangan pada tahun 2014 mengalami penurunan hingga mencapai 91,94 % berada pada kategori efektif. Pada tahun 2015 efektivitas keuangan daerah meningkat lagi hingga mencapai 100,57 % berada pada kategori sangat efektif.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara menunjukkan cenderung mengalami peningkatan dengan kategori efektif. Menurut Halim (2002) kemampuan dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100 %. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Berdasarkan hasil analisa di atas menunjukkan target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Buton Utara sangat rendah dan perbedaan capaian realisasi penerimaan dan target yang ditetapkan belum terlalu signifikan. Ketidakbenaran penentuan dan penetapan potensi PAD menjadi faktor utama penerimaan pendapatan daerah sangat rendah, selain itu petugas keuangan harus maksimal untuk meningkatkan PAD, asumsi-asumsi yang tidak rasional dalam menentukan potensi pendapatan harus dihilangkan. Faktor lain rendahnya PAD adalah bencana kekeringan yang menyebabkan hasil-hasil pertanian menjadi puso, perubahan regulasi membutuhkan waktu untuk sosialisasi, kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi juga sangat rendah serta keterbatasan infrastruktur untuk dapat menjangkau wilayah-wilayah pesisir dan perbatasan terluar daerah menjadi kendala untuk optimasi PAD. Akibat pengelolaan keuangan yang belum memenuhi prinsip-prinsip secara ekonomis, efisien dan efektif serta keterbatasan infrastruktur menjadi pemicu melambatnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini identik dengan hasil penelitian Haryanto (2014) yang menunjukkan secara rata-rata efektivitas keuangan daerah pada pemerintah Kota

Medan pada tahun 2009-2013 sudah cukup baik dengan persentase sebesar 87,96 %.

B. Analisis Rasio kemandirian Keuangan Daerah.

Rasio kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Hasil perhitungan rasio kemandirian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Perhitungan Rasio kemandirian keuangan Kab. Buton Utara tahun 2010-2015 (dalam rupiah)

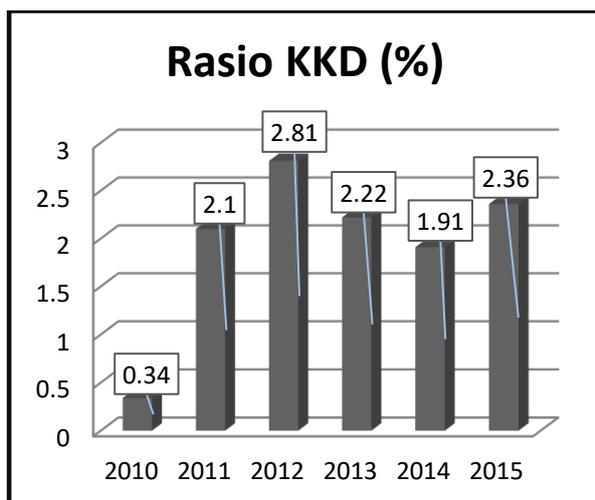
Tahun	PAD	Bantuan pusat/ Provinsi & pinjaman	Rasio Kemandirian (%)
2010	641.169.540	191.292.195.835	0,34
2011	7.292.730.711	347.362.075.182	2,10
2012	10.600.881.732	377.136.417.820	2,81
2013	9.826.179.237	443.289.452.181	2,22
2014	9.307.044.123	486.982.375.593	1,91
2015	12.954.475.584	549.501.379.818	2,36
Rata-rata			1,96

Sumber : BPKAD Kab. Buton Utara tahun 2016, data diolah

Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan daerah pada tabel di atas diketahui bahwa pada periode tahun 2010-2015 menunjukkan persentase tingkat kemandirian yang fluktuatif. Rasio kemandirian tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 2,81 % dikategorikan rendah sekali karena berdasarkan kriteria kemandirian keuangan daerah berada diantara 0 %-25 %. Sedangkan tingkat kemandirian terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 0,34 % menurut kriteria tingkat kemandirian keuangan daerah 0 %-25 % merupakan tingkat kemandirian rendah sekali.

Perkembangan rasio tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2. Rasio kemandirian keuangan pemerintah Kab. Buton Utara tahun 2010-2015



Dari grafik di atas terlihat rata-rata kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara selama tahun 2010-2015 sebesar 1,96 % dikategorikan rendah sekali. Menurut Halim (2002) semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 kemandirian keuangan berada pada titik terendah sebesar 0,34 % yang dikategorikan sangat rendah. Kemudian pada tahun 2011 dan 2012 kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,10 % dan 2,81 %, namun masih kategori sangat rendah. Pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan kemandirian keuangan masing-masing sebesar 2,22 % dan 1,91 %. Pada tahun 2015 kemandirian keuangan meningkat menjadi 2,36 % namun masih kategori sangat rendah.

Meskipun rasio kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara terus mengalami peningkatan, namun belum menunjukkan kemandirian yang semakin baik. Kemandirian keuangan daerah yang masih sangat rendah akan sangat mempersulit pemerintah dalam membiayai segala kegiatan operasionalnya. Menurut Halim (2008) semakin rendah tingkat rasio kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin tinggi.

Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Mengingat rendahnya tingkat kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam membiayai sendiri pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka ini berarti tidak ada peningkatan secara signifikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan perkembangan pertumbuhan kemandirian keuangan daerah yang cenderung

mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan pemerintah Kabupaten Buton Utara telah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern namun tampaknya dalam mendorong pertumbuhan PAD masih cenderung mengandalkan pajak dan retribusi yang didasarkan oleh peraturan yang ditetapkan. Sebaiknya dalam meningkatkan penerimaan PAD melalui pajak dan retribusi tidak hanya mengandalkan peraturan daerah semata, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas SDM, penyiapan sarana infrastruktur, peraturan dan perundangan yang memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi, netralitas, revitalisasi lembaga-lembaga terkait, desentralisasi kewenangan perizinan investasi, kebijakan pemberian fasilitas insentif kepada investor yang lebih menarik dan optimalisasi potensi perekonomian lokal sehingga bermanfaat kepada daerah.

Fenomena tersebut di atas harus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Buton Utara, mengingat semua pengeluaran dan penerimaan pemerintah harus dapat menciptakan efek *multiplier* terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketidakbenaran penentuan potensi PAD menjadi faktor utama target dan capaian realisasi penerimaan sangat rendah serta perencanaan potensi yang sifatnya *incremental* ditengarai sebagai penyebab dari pencapaian yang tidak maksimal, asumsi-asumsi yang tidak rasional dalam perhitungan potensi harus dihilangkan dan harus didasari pada perhitungan potensi PAD riil. Instansi teknis pengelola keuangan daerah haruslah dipacu bukan hanya untuk mengejar target tetapi semaksimal mungkin bekerja dalam upaya optimasi PAD.

Upaya meningkatkan PAD dalam membiayai pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sangat diperlukan dalam otonomi daerah. Hal ini, mengingat tujuan otonomi daerah adalah terciptanya kemandirian guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam pemungutan pajak dan retribusi serta penggunaan anggaran yang tidak tepat haruslah dihilangkan karena menimbulkan kinerja keuangan yang buruk.

Penelitian ini identik dengan hasil penelitian Adi (2006) yang menunjukkan semakin rendahnya kontribusi PAD dalam membiayai pengeluaran daerah. Dan identik dengan Setiaji (2007) yang menyatakan bahwa ada faktor lain yang menyebabkan semakin kecilnya kontribusi PAD terhadap total belanja.

C. Analisis Rasio laju pertumbuhan ekonomi

Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015 dilakukan analisis rasio pertumbuhan dengan membandingkan PDRB tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Hasil perhitungan rasio pertumbuhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.

Perhitungan rasio laju pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015

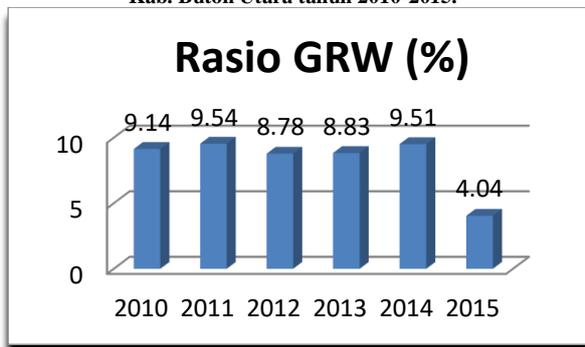
Tahun	PDRB ADHK (Juta Rp)	Pertumbuhan ekonomi (%)
2009	1.094.838,22	-
2010	1.194.906,43	9,14
2011	1.308.900,50	9,54
2012	1.423.821,96	8,78
2013	1.549.525,44	8,83
2014	1.696.886,57	9,51
2015	1.765.456,70	4,04
Rata-rata	1.489.916,27	8,31

Sumber : BPS Kab. Buton Utara, tahun 2016

Berdasarkan perhitungan tabel di atas rasio laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Utara selama tahun 2010-2015 menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi mencapai titik tertinggi sebesar 9,54 %. Sedangkan tahun 2015 menunjukkan tingkat pertumbuhan terendah hanya sebesar 4,04 %.

Perkembangan rasio laju pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3. Rasio laju pertumbuhan ekonomi Kab. Buton Utara tahun 2010-2015.



Dari grafik di atas terlihat pertumbuhan ekonomi selama tahun 2010-2015 menunjukkan peningkatan dan melambat. Menurut Sukirno (2010) pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Hasil perhitungan rasio laju pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten Buton Utara pada tahun 2010 sampai dengan 2015 menunjukkan pertumbuhan yang baik walaupun juga terjadi melambatnya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi sebesar 9,14 % masuk kategori baik dan pada tahun 2011 mencapai titik tertinggi dalam 6(enam) tahun terakhir yakni tumbuh sebesar 9,54 %. Selanjutnya pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi melambat sebesar 8,78 %, tahun 2013 meningkat sebesar 8,83 % dan tahun 2014 meningkat

lagi menjadi 9,51 %. Akan tetapi pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi jauh melambat hingga mencapai 4,04 %. Melambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2015 disebabkan bencana kekeringan kemarau panjang, sehingga menyebabkan hasil-hasil pertanian menjadi puso. Sementara lapangan usaha pemberi kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten Buton Utara berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Selain itu adanya pengerahan tenaga kerja yang berasal dari luar Kabupaten Buton Utara tahun sebelumnya untuk mengerjakan proyek-proyek pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) Porprov Sulawesi Tenggara XIV di Kabupaten Buton Utara.

Meskipun rasio laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dan melambat, namun secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten Buton Utara sebesar 8,31 % di atas normalnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik ini tentu akan turut mendorong sektor-sektor lain untuk bergerak. Melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan pada masa awal pemerintahan Kabupaten Buton Utara pelaksanaan pembangunan lebih banyak fokus pada kegiatan infrastruktur akan tetapi setelah pembangunan infrastruktur ini terpenuhi, maka pembangunan akan diarahkan pada sektor-sektor perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi akan bergerak ke arah yang lebih positif dan signifikan.

Oleh karena itu pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus terus berupaya membangun dan mengembangkan infrastruktur pendukung, melakukan reformasi birokrasi yang selama ini menghambat tumbuhnya investasi, maupun melakukan berbagai kebijakan strategis terkait lainnya. Disamping itu partisipasi semua komponen masyarakat dalam meningkatkan PDRB perkapita akan turut mendorong tumbuhnya perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini identik dengan hasil penelitian Sardi dan Saranani (2016) yang menyatakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara selama 5(lima) tahun rata-rata sebesar 8,05 % yang berarti cukup baik. Penelitian ini juga sejalan dengan Bappenas (2003) yang menyatakan pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan PDRB (ekonomi) dan konsisten dengan Hamzah (2008) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan perspektif di atas, seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal dari pada sekedar mengeluarkan produk perundangan. Karena faktor utama yang dapat mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hasil perhitungan Rasio efektivitas keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara selama tahun 2010-2015 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2015 efektivitas keuangan sangat efektif masing-masing sebesar 118,97 %, 123,89 %, 133,66 % dan 100,57 %. Sementara itu efektivitas keuangan tahun 2010 sebesar 11,53 % dengan kategori tidak efektif dan tahun 2014 efektivitas keuangan efektif sebesar 91,94 %. Efektivitas keuangan tertinggi tahun 2013 dan terendah tahun 2010. Efektivitas keuangan di atas 100 % menunjukkan target PAD yang ingin dicapai teralisasi sesuai target. Secara rata-rata efektivitas keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara cukup baik dengan persentase sebesar 96,76 %.
2. Rasio kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015 menunjukkan rata-rata sebesar 1,96 % dikategorikan sangat rendah, rasio kemandirian terendah terjadi tahun 2010 sebesar 0,34 % dengan kategori sangat rendah dan tertinggi tahun 2012 sebesar 2,81 % namun kategori masih sangat rendah. Tingkat kemandirian ini menunjukkan ketergantungan terhadap bantuan ekstern masih besar. Berdasarkan pertumbuhan kemandirian keuangan yang cenderung meningkat. Ini berarti pemerintah daerah telah berupaya mengurangi ketergantungan dengan peningkatan kemandirian ke arah yang lebih baik.
3. Hasil perhitungan laju pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015 menunjukkan pertumbuhan yang baik dengan rata-rata persentase sebesar 8,31 %. Dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2011 sebesar 9,54 % dan terendah tahun 2015 hanya sebesar 4,04 %.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah harus menentukan sumber-sumber PAD yang baru dan proses pengelolaannya tidak harus didasari pada data histori yang berdampak tidak akurat dan optimal pengelolaan PAD. Objek pungutan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah harus lebih dimaksimalkan dan dimutakhirkan datanya. Pemda harus melakukan perbaikan infrastruktur untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi dan petugas pengelola keuangan daerah agar bekerjakooperatif dan profesional. Melakukan kerjasama dan memberikan kemudahan bagi investor. Selain itu perlu dibentuk BUMD untuk menampung dan memberikan kepastian harga-harga komoditas ditingkat petani.

2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan memperhatikan potensi serta karakteristik daerah diperlukan kinerja keuangan yang baik yang dapat bersinergi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3. Dengan keterbatasan peneliti, maka penelitian selanjutnya dapat menambahkan dengan variabel-variabel lain yang diperkirakan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya : rasio efisiensi, rasio pertumbuhan dan rasio keserasian belanja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. "Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali)" Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
- BAPPENAS. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Halim, Abdul 2002. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul 2002. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Haryanto, Andri. 2014. *Analisis Efektivitas, Kemandirian, dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hamzah, Ardi. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan: Pendekatan Analisa Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten dan 9 Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006)*. Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 3 No. 1. pp. 1-26.
- Arsyad, Lincoln, 1999. *Pengantar perencanaan dan pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta. BPFE.
- Bastian, Indra, 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit BPFE, UGM.
- Boediono, 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE
- Saputra, Dori. 2014. *Analisis kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pada kabupaten dankota di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Akuntansi. Vol. 2. No.1. pp. 1-26.
- Kepmendagri, Nomor 690.900.327, 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Pelayanan Publik*. Yogyakarta. BPTE.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Sardi., Balaka, Muh. Yani., Saranani, Fajar. 2016. *Kemampuan fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara*. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan. Vol. 1. No. 1. pp. 120-145.
- Sekaran, Uma, 2006, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiaji, Wirawan., Adi, Priyo Hadi. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi X., Juli, 26-28. Makassar.
- Siagian, Sondang, 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Rineka Cipta
- Steinberg, L. 2002. *Adolescence. Sixt edition*. New York : McGraw-Hiil.
- Suharyat, Yayat. 2009. *Hubungan Antara Sikap, Minat, Dan Perilaku Manusia*. REGION. Vol. 1. No. 2. pp. 1-19.
- Sukirno, S, 2007. *Pengantar Teori Makro Ekonomi. Edisi II*. Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Syukriy, Abdullah., Halim, Abdul. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemerintahan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2. No. 2. pp. 17-32.
- Todaro, MP, 1997. *Pembangunan ekonomi di dunia ke tiga, Edisi ke enam, Alih Bahasa: Drs. Haris Munandar, MA*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Yuliati, 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi otonomi daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.